



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PERUBAHAN ***RENSTRA*** RENCANA STRATEGIS ***2022-2027***

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

jogja
istimewa

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) 2022-2027 disusun sebagai perwujudan amanah Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tindaklanjut Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.7.2/8357 Tanggal 18 November 2024 tentang Penyusunan Renstra Perubahan/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 yang difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045.

Dengan adanya penyesuaian subkegiatan, maka perlu Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKA DIY Tahun 2022-2027 perlu disusun dengan memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra BPKA DIY Tahun 2022-2027 perlu dilaksanakan untuk mendukung tugas fungsi, optimalisasi kinerja pelayanan serta perkembangan kebutuhan perencanaan penganggaran tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan dan penambahan sub kegiatan.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

KEPALA BPKA DIY



WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦑꦼꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠꦤꦼꦩꦼꦂꦠꦤꦼꦠꦼꦩꦼꦭꦏꦺꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Pswt. 1117 Faksimile (0274) 521818
Website : <http://bpka.jogjaprovgov.go.id> Email bpkadiy@jogjaprovgov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 00.7.2.6/10263

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022 - 2027

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKA DIY tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2022 - 2027.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2023.....

2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027;

13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

15. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.7.2/8357 tentang Penyusunan RENSTRA/Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyusun Perubahan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut :

- a. menyajikan data target dan capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja program periode sebelumnya dan periode yang akan datang;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. menyajikan data *time series* periode sebelumnya atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. melakukan permasalahan, identifikasi isu strategis, hambatan, tantangan yang dihadapi serta kekuatan yang dimiliki Perangkat Daerah;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan BPKA DIY;

Melaksanakan....

g. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 November 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc
NIP. 19680215 199403 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGELOLA KEUNGAN DAN ASET
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 00.7.2.6/10263
 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 BADAN PENGELOLA KEUNGAN DAN ASET
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2022-2027

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Kepala BPKA DIY
2.	Koordinator	Sekretaris BPKA DIY
3.	Fasilitator	Kepala Bidang Anggaran Belanja
		Kepala Bidang Akuntansi
		Kepala Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah
		Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah
		Kepala Bidang Anggaran Pendapatan
		Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
4.	Anggota	Kepala Subbidang/Kepala Subbagian/Ketua Tim Kerja pada BPKA DIY
		Pelaksana pada BPKA DIY

KEPALA
 BPKA
 WYOS SANTOSO, SE, M.Acc
 NIP. 19680215 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
KEPUTUSAN KEPALA BPKA DIY tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPKA DIY TAHUN 2022-20227.....	2
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I. PENDAHULUAN.....	10
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Landasan Hukum.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.....	16
2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	102
BAB VIII. PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan	20
Tabel 2. Sarana-Prasarana di BPKA dan KPPD Kabupaten/Kota di DIY	22
Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 4. Capaian Anggaran Belanja 2018 – 2022	26
Tabel 5. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2017 – 2020	29
Tabel 6. Realisasi Pendapatan BPKA DIY Tahun 2017 – 2020	30
Tabel 7. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2017– 2020	31
Tabel 8. Realisasi Belanja BPKA DIY Tahun 2017– 2020.....	32
Tabel 9. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2021 - 2023.....	33
Tabel 10. Daftar Inovasi Tahun 2023	37
Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Pemda DIY tahun 2022-2027	54
Tabel 12. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Rincian Tugas Fungsi BPKA DIY	55
Tabel 13. Penyertaan Modal BUMD DIY	57
Tabel 14. Return on Assets BUMD DIY	57
Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Pemda DIY tahun 2022-2027	59
Tabel 16. Tujuan, indikator tujuan/sasaran BPKA DIY tahun 2022-2027.....	60
Tabel 17. Pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	63
Tabel 18. Program Pemda dan Indikator Program Pemda tahun 2022 - 2027	65
Tabel 19. Program dan Indikator Program BPKA DIY tahun 2022 - 2027	66
Tabel 20. Target dan Meta Indikator Program	66
Tabel 21. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2022-2027.....	68
Tabel 22. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2022 – 2027	69
Tabel 23. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang Mengacu pada RPJMD 2022-2027	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKA DIY	18
Gambar 2. Struktur Organisasi UPT (KPPD DIY).....	19
Gambar 3. Grafik Pejabat Struktural Berdasarkan jenis kelamin.....	20
Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	21

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY berdampak pada adanya perubahan kelembagaan serta struktur organisasi dan tata kelola beberapa perangkat daerah di DIY. Selain itu, pada penyusunan RKPD DIY Tahun 2025 terdapat penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 10 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis/Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027. Secara terperinci, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selaras dengan RPJMD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dinamika perubahan regulasi, BPKA DIY sebagai OPD yang dengan tugas fungsinya sebagai pengelola pendapatan dan aset daerah memiliki peran strategis sesuai perannya dalam mendukung misi ketiga RPJMD Pemda DIY yaitu meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. RENSTRA BPKA DIY bersifat indikatif dan memiliki fungsi untuk mempermudah dalam melakukan pengendalian terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka perlu dilakukan penyusunan dokumen Perubahan RENSTRA BPKA DIY Tahun 2022-2027 dalam rangka penyelerasan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan mulai tahun 2025 untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata Kelola pemerintah yang berbasis *good governance* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dengan tersusunnya dokumen RENSTRA BPKA DIY, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan tugas fungsi sebagai unsur penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan, RENSTRA yang disusun berisi antara lain:

1. Arah kebijakan dan strategi BPKA DIY dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
4. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatif berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.

Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun yang memuat program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan. RENSTRA bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Di samping itu, rencana strategis merupakan salah satu upaya BPKA DIY membangun suatu sistem pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

RENSTRA BPKA DIY Tahun 2022-2027 memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA DIY.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan RENSTRA BPKA DIY tahun 2022-2027 disusun sebagai pedoman perencanaan BPKA DIY untuk jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA DIY yang berpedoman pada RPJMD DIY serta bersifat indikatif.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RENSTRA BPKA DIY tahun 2022-2027 yaitu :

- a). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, khususnya urusan keuangan secara transparan dan akuntabel ;
- b). Sebagai bahan evaluasi kinerja BPKA DIY selama 5 (lima) tahun periode RENSTRA
- c). Menjamin terlaksananya program kegiatan secara terstruktur, efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPKA DIY adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BPKA DIY

Pada bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKA DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPKA DIY dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPKA DIY periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BPKA DIY yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPKA DIY .

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BPKA DIY, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKA DIY

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKA DIY dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BPKA DIY yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan nomenklatur subbidang, jabatan dan tugas fungsi bidang sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;

- n. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- o. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;
- q. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- r. penyusunan pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BPKA DIY memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY) yang berada di kabupaten/kota. Sebagai wujud implemetasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tugas fungsi KPPD DIY yang semula mengacu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY. Tugas KPPD DIY di kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah kecuali pajak bahan bakar dan pajak rokok, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada KPPD DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY;
- b. pelaksanaan pemungutan pajak daerah kecuali pajak bahan bakar dan pajak rokok, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah kecuali pajak bahan bakar dan pajak rokok, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan pajak daerah kecuali pajak bahan bakar dan pajak rokok, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa pajak daerah kecuali pajak bahan bakar dan pajak rokok, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pengendalian operasional pemungutan pajak daerah kecuali pajak bahan bakar dan pajak rokok, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- g. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB dengan pemerintah kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

2.2. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

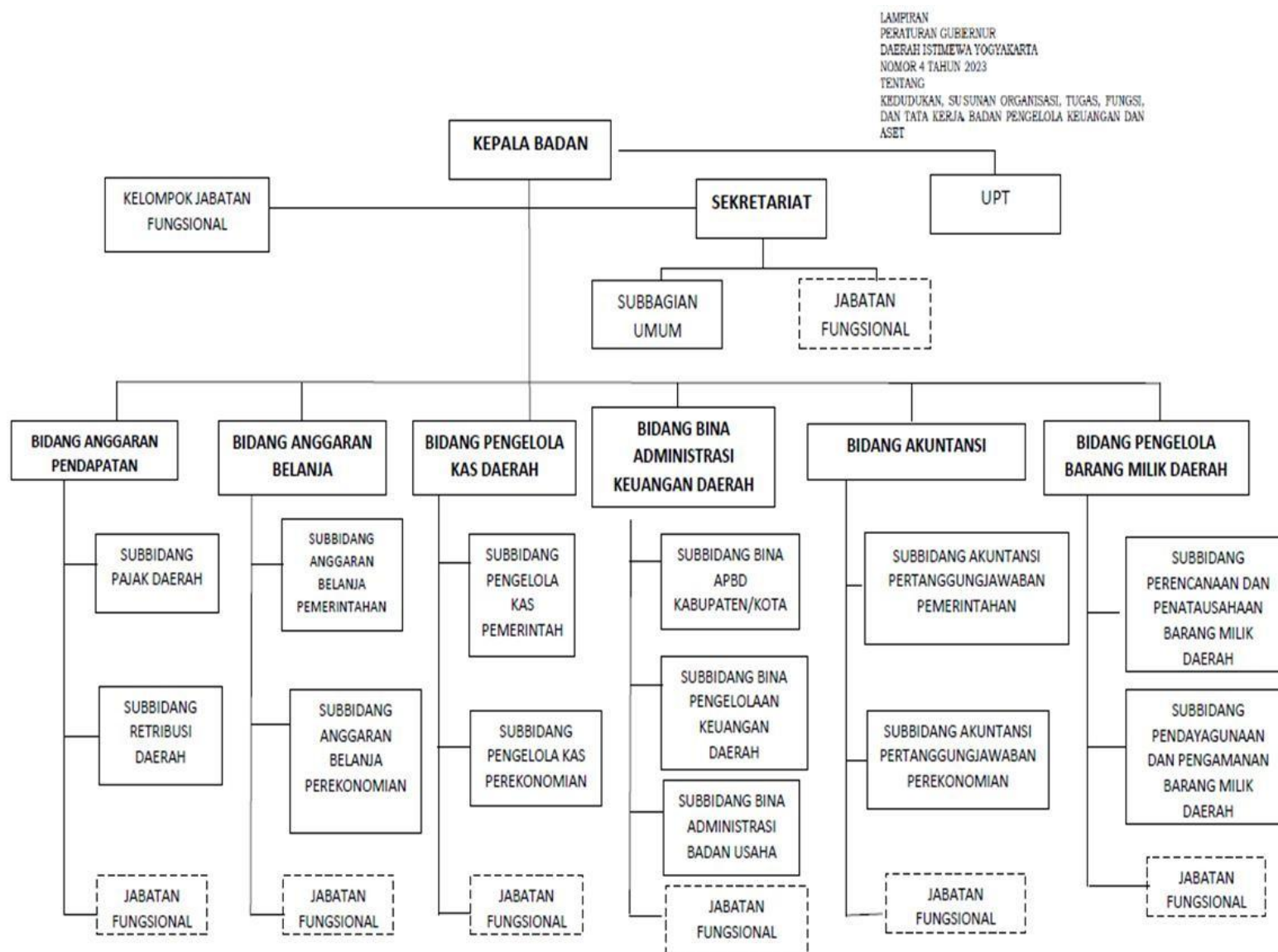
BPKA DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan.

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretariat, terdiri atas** Subbagian Umum, Kelompok Substansi Program dan Kelompok Substansi Keuangan.
- 3. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas :** Subbidang Pajak Daerah, Subbidang Retribusi Daerah dan Kelompok Substansi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer.
- 4. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:** Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan, Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian, Kelompok Substansi Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Anggaran Belanja Sosial Budaya.
- 5. Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri dari:** Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan, Subbidang Pengelola Kas Perekonomian, Kelompok Substansi Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Pengelola Kas Sosial Budaya.
- 6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri dari:** Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
- 7. Bidang Akuntansi, terdiri dari:** Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan, Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian, Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya.
- 8. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri dari:** Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah serta Kelompok Substansi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 9. Unit Pelaksana Teknis; dan**
- 10. Jabatan Fungsional.**

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi BPKA DIY



Sumber : Pergub DIY Nomor 4 Tahun 2023

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY terdiri dari:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kota Yogyakarta;
- b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul;
- c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Kulonprogo;
- d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Gunungkidul; dan
- e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman.

Gambar 2. Struktur Organisasi UPT (KPPD DIY)



2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3.1. Sumber Daya Manusia

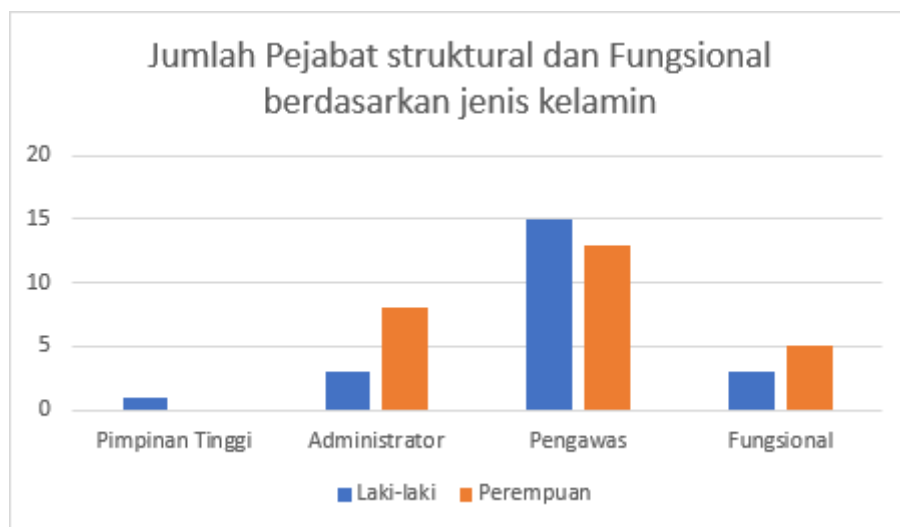
Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi.

Sumberdaya manusia di BPKA DIY sampai dengan 31 Oktober 2024, tercatat sebanyak 210 pegawai yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi 1 orang, jabatan administrasi 209 orang yang terdiri dari jabatan administrator 11 orang, jabatan pengawas 28 orang dan jabatan pelaksana 162 orang, sedang jabatan fungsional 8 orang. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan dan kebutuhan pegawai secara ideal.

a. Profil Pejabat Struktural BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, kebutuhan formasi jabatan BPKA DIY sebanyak 52 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 Pejabat administrator (setara eselon III) di BPKA sebanyak 11 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, sedangkan pengawas (setara eselon IV) sebanyak 28 orang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 orang perempuan serta jabatan fungsional (setara ahli muda) sebanyak 8 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BPKA DIY. Profil Pejabat Struktural dan Fungsional di BPKA DIY disajikan dalam gambar di bawah:

Gambar 3. Grafik Pejabat Struktural Berdasarkan jenis kelamin



Sumber: BPKA DIY (per Oktober 2024)

b. Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Oktober 2024 dapat dilihat pada table 2.1 berikut:

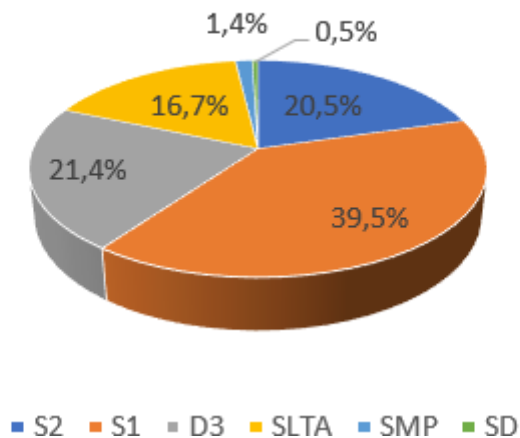
Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sarjana S2	22	21
2	Sarjana S1	47	36
3	D3	18	27
4	SLTA	21	14
5	SMP	3	0
6	SD	1	0

Sumber: BPKA (per Oktober 2024)

Jumlah pegawai BPKA DIY per 31 Oktober 2024 pada Tabel 2-1 di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BPKA DIY sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasarkan tingkat pendidikan, maka komposisi jumlah pegawai seperti disajikan dalam gambar berikut :

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari gambar dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPKA didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (83 orang atau 39,5%), kemudian pegawai dengan pendidikan Diploma 3 (45 orang atau 21,4%), diikuti pendidikan S-2 (43 orang atau 20,5%), pendidikan SLTA (35 orang atau 16,7%), pendidikan SMP (3 orang atau 1,4%) dan pendidikan SD (1 orang atau 0,5%). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masih kurang sebanyak 321 orang, namun dari kualitas personil di BPKA DIY (dengan meingkatkan kompetensi pegawai) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 129/KEP/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2024, Sarana Prasarana kerja penunjang pada BPKA dan KPPD se DIY terdiri dari Aset Tetap dan Aset tetap Lainnya. Untuk aset tetap antara lain berupa Alat Angkutan 66 Unit, Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.200 unit, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 656 unit, Komputer 1.841 unit dan Bangunan Gedung 70 Unit, , sedang aset tetap lainnya antara lain adalah bahan perpustakaan 2.490 unit.

Kondisi riil sampai dengan akhir Oktober 2024 kebutuhan sarana prasarana penunjang kerja organisasi meliputi ruang kerja, peralatan computer, alat telekomunikasi maupun alat transportasi telah tercukupi. Aset-aset yang dimiliki pada BPKA dan KPPD DIY di Kabupaten/Kota se

DIY senilai 315.992.628.303,40 rupiah dalam kondisi baik. Kondisi eksisting dan kebutuhan riil Sarana prasarana penunjang kerja organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Sarana-Prasarana di BPKA dan KPPD Kabupaten/Kota di DIY

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1	Tanah	18 unit	63.562.549.835,00
2	Alat Besar	54 unit	11.108.319.250,00
3	Alat Angkutan	66 unit	6.615.290.200,00
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	31 unit	1.263.738.925,00
5	Alat Pertanian	15 unit	39.813.000,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.200 unit	43.992.006.880,41
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	656 unit	5.295.267.150,00
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	40 unit	73.790.000,00
9	Alat Laboratorium	29 unit	973.345.000,00
10	Alat Persenjataan	4 unit	70.614.000,00
11	Komputer	1.841 unit	20.062.459.852,99
12	Rambu-Rambu	1 unit	4.200.000,00
13	Peralatan Olah Raga	2 unit	84.395.000,00
14	Bangunan Gedung	70 unit	154.578.812.378,00
15	Bangunan Menara	1 unit	30.300.000,00
16	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5 unit	1.989.929.092,00
17	Bangunan Air	14 unit	1.708.177.900,00
18	Instalasi	17 unit	587.574.250,00
19	Jaringan	12 unit	3.316.227.700,00
Aset Tetap Lainnya			
1	Bahan Perpustakaan	2.477 buku	216.950.690,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12 unit	2.600.000,00
3	Tanaman	1 unit	14.850.000,00
4	Konstruksi dalam Pengerjaan	3 unit	401.317.200,00
	Jumlah	14.769 unit	315.992.628.303,409

Sumber: Data Rekapitulasi Buku Inventaris BPKA DIY per Oktober 2024, data diolah (*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024)

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional meliputi kendaraan dinas yang terdiri dari yakni 4 (empat) unit kendaraan dinas bermotor perorangan, 24 (dua puluh empat) unit kendaraan bermotor penumpang, 2 (dua) unit kendaraan bermotor barang dan 25 (dua puluh lima) unit kendaraan roda dua untuk operasional. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2024 mencapai cukup ideal, namun apabila dilihat secara kualitatif masih banyak yang perlu perbaikan maupun *upgrading*. Untuk mengikuti dinamika penambahan pegawai, akan dilakukan

inventarisasi tambahan sarana prasarana untuk menunjang kinerja.

Sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini secara umum mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik/masyarakat wajib pajak untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya dengan adanya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) untuk menambah akses pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik layanan maupun jam layanan kepada masyarakat wajib pajak, pemeliharaan, perbaikan maupun perluasan tempat layanan di gedung kantor induk KPPD, Samsat Pembantu maupun titik layanan lainnya. Selain itu juga senantiasa berupaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai langkah awal dicanangkannya suatu unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah dengan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penandatanganan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian.

Untuk menunjang kegiatan tersebut peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan. Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai *success story* pembangunan Zona Integritas di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat sebuah instansi yang berintegritas.

2.3.3. Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. BPKA DIY selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama periode tahun 2017-2022 BPKA DIY telah membangun beberapa sistem informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan retribusi dan pelayanan kesamsatan sebagai berikut :

➤ Sistem Aplikasi Kesamsatan

Sistem Aplikasi kesamsatan terus mengalami pengembangan yaitu:

- a. Samsat *Online* yang memungkinkan seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah DIY dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota mana saja di wilayah DIY,
- b. *e-samsat*, memungkinkan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank BPD DIY dan melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada kertas termal melalui mesin *E-POSTI*.

Pengembangan aplikasi kesamsatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka intensifikasi pajak daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

➤ **Sistem Informasi Pendapatan Daerah**

Pengguna aktif aplikasi ini adalah bendahara penerima untuk melakukan penatausahaan penerimaan pendapatan setiap hari secara real time, sehingga laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban, laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel.

➤ **Sistem Informasi Aplikasi Persediaan**

Aplikasi Persediaan berbasis Web adalah Aplikasi yang menghasilkan Laporan Persediaan yang akurat dan akuntabel. Aplikasi ini dibutuhkan dalam rangka membantu pencatatan persediaan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada akun Persediaan dan Beban Persediaan dan sebagai kontrol penggunaan barang persediaan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Aplikasi Persediaan dapat diketahui jumlah dan nominal barang persediaan secara *real-time* sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang persediaan.

➤ **Sistem Informasi Pelaporan**

Sistem Informasi Pelaporan merupakan bagian dari Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD digunakan oleh Petugas Akuntansi sebagai alat bantu melakukan penyusunan Laporan Keuangan, sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan.

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Fungsi pengelolaan keuangan dan aset ditunjukkan melalui penyediaan dokumen penganggaran sampai ke dokumen pelaporan keuangan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a) Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan
- b) Pergub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan
- c) Laporan Keuangan Pemda Audited
- d) Perda Pertanggungjawaban APBD
- e) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
- f) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS P)
- g) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
- h) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- i) Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)
- j) Standard Belanja Kegiatan (SBK)

Pergub DIY Nomor 123 tahun 2021 mengamatkan beberapa ketugasan baru BPKA DIY dalam hal penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran sebagai berikut : Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang semula diampu oleh BAPPEDA DIY dan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) serta Standar Belanja Kegiatan (SBK) yang semula diampu oleh Biro Organisasi Setda DIY. Selain itu terdapat perubahan beberapa struktur penganggaran pada BPKA mengikuti dinamika perubahan peraturan perundangan, yaitu belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga yang semula dianggarkan dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi subkegiatan pada DPA SKPD; pembiayaan yang semula masuk dalam DPA-SKPD pada SKPKD berpindah menjadi DPA SKPD.

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator RENSTRA BPKA DIY pada tahun 2017 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target RENSTRA PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1.	Peningkatan Transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Nilai rupiah aset-aset Pemda DIY	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.505.543.500	7.107.452.565	3.069.093.332	5.239.098.025	15.486.233.611	109,33	114,00	47,56	78,14	222,26

Sumber data : LKjIP BPKA DIY

Tabel 4. Capaian Anggaran Belanja 2018 – 2022

ANGGARAN BELANJA					REALISASI					PERSENTASE REALISASI				
(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)
1.594.131.933.009	1.957.955.406.253	2.573.967.318.659	1.527.363.558.582	1.500.550.634.235	1.491.220.492.175	1.881.885.537.026	2.358.356.016.234	1.460.497.516.113	1.414.601.348.357	93,54	96,11	91,62	95,62	94,27

Sumber data : Laporan Keuangan Audited BPKA DIY

Dalam upaya untuk mencapai target kinerja pada periode Renstra 2017-2022, BPKA DIY telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode RPJMD 2017-2022. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

Capaian indikator kinerja pertama, yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada rentang RPJMD dan Renstra 2017-2022 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut diukur secara kualitatif berdasarkan persentase transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Faktor pendorong ketercapaian sasaran tersebut yaitu :

1. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Pusat;
2. Dukungan sarana dan prasarana yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang semakin baik;
3. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai target sasaran pertama, beberapa hal yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan keuangan daerah;
2. Kebijakan penggunaan SIPD, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada sistem informasi keuangan daerah (simpler.jogjapro.go.id) yg cukup menyita waktu sehingga mengakibatkan pekerjaan tertunda.

Adapun indikator kedua yaitu optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah yang diukur secara kuantitatif dengan melihat nilai proyeksi optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah. Capaian indikator dimaksud didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Realisasi optimalisasi aset-aset pada pengelola barang milik daerah pada tahun 2020-2021 tidak mencapai target dikarenakan faktor penghambat yang sifatnya eksternal, yaitu terjadinya pandemi COVID-19 secara global yang berdampak kepada terganggunya aspek-aspek ekonomi tidak hanya nasional namun juga regional. Dampak pandemi tersebut di wilayah DIY menyebabkan penyewa BMD mengakhiri kontrak di tahun 2020, di antaranya Jogja Expo Center. Pandemi COVID-19 ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala besar yang untuk sementara tidak boleh diselenggarakan karena berpotensi untuk meningkatkan penularan

virus. PPKM merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 yang sebelumnya, pemerintah sempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan PPKM ini dilakukan serentak atas dasar komando pemerintah pusat. Selain itu banyak penyewa lahan BMD yang mengajukan keringanan pembayaran sewa. Pada tahun 2021 dilakukan penilaian ulang sewa Gedung JEC oleh tim penilai independen, namun harga sewa hasil *appraisal* tidak sesuai dengan target, sehingga mempengaruhi capaian kinerja optimalisasi aset.

Pada tahun 2022 sebagai akhir periode RENSTRA 2017-2022, realisasi optimalisasi aset melampaui target akhir periode, yaitu sebesar 122,26%, dari target Rp 6.967.568.518,- telah tercapai Rp 15.486.233.611,- atau sebesar 222,26%.

Faktor pendorong kinerja optimalisasi aset yaitu :

1. Penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah
2. Koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah
3. Adanya lahan/bangunan BMD yang dipergunakan oleh penyewa
2. Inovasi dalam penghapusan yang sebelumnya setor tunai dilakukan secara nontunai dengan rekening tampungan penjualan BMD.
3. Pengembangan aplikasi aset tetap dan persediaan sangat membantu dalam kesesuaian prosedur pengelolaan BMD
4. Kodefikasi baru sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 tahun 2020 sudah dapat dipahami dengan baik oleh pengurus barang di OPD.

Pencapaian kinerja BPKA DIY dalam kurun waktu 2017-2022 tidak terlepas dari dukungan anggaran penadanaan untuk melaksanakan tugas fungsi BPKA DIY. Pada tahun 2021 terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Implikasi perubahan peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD meliputi komponen pendapatan (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan komponen belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Oleh karena itu terdapat perubahan struktur APBD BPKA mulai tahun 2021, dan disajikan dalam table terpisah. Anggaran dan realisasi pendanaan BPKA DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja untuk pencapaian kinerja layanan serta serapannya ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 5. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2017 – 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	4.993.612.151.151,33	5.300.934.485.722,71	5.632.376.567.530,71	5.489.510.137.708,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.694.327.263.469,33	1.828.036.366.283,71	1.934.073.885.772,71	1.731.318.063.980,54
Pajak Daerah	1.547.079.846.841,00	1.657.459.687.185,00	1.750.611.839.616,00	1.596.879.866.993,00
Hasil Retribusi Daerah	6.237.646.550,00	6.607.252.095,00	7.342.607.690,00	698.044.875,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.940.478.183,14	85.897.784.674,86	85.997.899.680,29	101.460.382.142,49
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.069.291.895,19	78.071.642.328,85	90.121.538.786,42	32.279.769.970,05
DANA PERIMBANGAN	2.445.571.241.958,00	2.381.613.555.213,00	2.467.472.059.005,00	2.395.248.332.317,00
Dana Bagi Hasil Pajak	124.966.725.447,00	135.632.688.000,00	84.306.517.000,00	115.924.403.473,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	29.443.411,00	33.269.000,00	36.431.000,00	31.627.168,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.885.724.600,00	4.903.054.000,00	5.210.616.300,00	3.895.404.028,00
Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.372.147.000,00	1.351.102.020.000,00	1.234.516.326.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.000.317.201.500,00	926.672.397.213,00	1.026.816.474.705,00	1.040.880.571.648,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	853.713.645.724,00	1.091.284.564.226,00	1.230.830.622.753,00	1.362.943.741.411,39
Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00	79.955.500.347,00	8.520.100.000,00	7.533.500.000,00
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	838.221.602.877,00	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,39
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	643.531.450,00	706.035.310,00	780.019.190,00

Tabel 6. Realisasi Pendapatan BPKA DIY Tahun 2017 – 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	4.992.838.617.485,37	5.342.276.981.165,06	5.609.993.689.139,20	5.534.152.262.769,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.759.570.794.262,37	1.934.918.131.183,06	1.993.435.291.133,20	1.800.739.024.337,00
Pajak Daerah	1.583.875.063.883,00	1.717.291.718.438,00	1.773.940.604.572,00	1.646.559.198.863,00
Hasil Retribusi Daerah	6.757.952.350,00	6.991.961.130,00	7.432.218.400,00	736.782.032,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.411.759.885,57	85.097.737.606,37	85.960.824.196,14	101.460.382.151,46
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.526.018.143,80	125.536.714.008,69	126.101.643.965,06	51.982.661.290,54
DANA PERIMBANGAN	2.379.856.461.840,00	2.322.339.865.403,00	2.385.702.912.253,00	2.371.044.354.021,00
Dana Bagi Hasil Pajak	92.497.369.187,00	93.097.809.176,00	50.825.058.200,00	110.660.909.197,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	36.078.889,00	44.756.323,00	24.907.600,00	24.870.747,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.950.007.720,00	4.903.054.000,00	5.210.616.000,00	3.591.562.731,00
Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	1.351.102.020.000,00	1.227.647.676.000,00
Dana Alokasi Khusus	967.000.859.044,00	910.032.137.851,00	978.540.310.453,00	1.029.119.335.346,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	853.411.361.383,00	1.085.018.984.579,00	1.230.858.985.753,00	1.362.368.884.411,00
Pendapatan Hibah	14.485.236.531,00	73.681.960.000,00	8.548.463.000,00	6.958.643.000,00
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	838.270.746.752,00	1.010.685.532.429,00	1.221.604.487.443,00	1.354.630.222.221,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	655.378.100,00	651.492.150,00	706.035.310,00	780.019.190,00

Tabel 7. Anggaran Belanja BPKA DIY Tahun 2017– 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
BELANJA		143.800.071.600,00	155.153.103.130,81	221.476.886.478,00
BELANJA OPERASI		127.152.294.805,00	143.979.312.130,81	145.230.385.278,00
Belanja Pegawai	90.256.536.888,52	99.317.793.675,00	114.318.931.103,81	119.946.554.328,00
Belanja Barang dan Jasa	25.707.116.040,00	27.834.501.130,00	29.660.381.027,00	25.283.830.950,00
BELANJA MODAL	65.757.224.550,00	16.647.776.795,00	11.173.791.000,00	76.246.501.200,00
Belanja Modal Tanah		36.900.000,00	18.250.000,00	72.727.700.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		6.719.758.795,00	6.568.621.000,00	2.615.043.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		9.228.398.000,00	4.027.320.000,00	187.082.700,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.500.000,00	13.000.000,00	468.700.000,00
Belanja Modal Tetap Aset Lainnya		5.600.000,00	5.600.000,00	4.850.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		651.620.000,00	541.000.000,00	243.125.000,00

Tabel 8. Realisasi Belanja BPKA DIY Tahun 2017- 2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
BELANJA		131.352.709.134,00	145.356.161.571,00	210.870.555.950,39
BELANJA OPERASI		117.099.495.920,00	135.373.617.731,00	134.874.831.006,39
Belanja Pegawai	84.323.572.442	91.545.667.603,00	107.981.352.512,00	111.522.337.649,39
Belanja Barang dan Jasa	22.690.062.726,52	25.553.828.317,00	27.392.265.219,00	23.352.493.357,00
BELANJA MODAL	64.141.880.223,00	14.253.213.214,00	9.982.543.840,00	75.995.724.944,00
Belanja Modal Tanah		11.048.800,00	4.010.200,00	72.515.441.840,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		6.117.667.800,00	6.069.422.640,00	2.579.495.904,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		7.503.860.814,00	3.365.749.000,00	187.082.700,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.400.000,00	13.000.000,00	467.255.000,00
Belanja Modal Tetap Aset Lainnya		5.590.800,00	5.462.000,00	4.449.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya		609.645.000,00	524.900.000,00	242.000.000,00

Tabel 9. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2021 - 2023

URAIAN	2021		2022		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	5.604.650.653.563,00	5.622.166.227.521,01	5.407.663.603.049,00	5.433.638.565.323,91	5.774.305.080.245	5.752.478.035.985,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.791.333.816.320,00	1.819.988.993.060,24	2.113.523.015.707,00	2.165.875.030.591,19	2.287.741.737.658	2.280.596.201.146,65
Pajak Daerah	1.668.485.236.037,00	1.688.443.843.923,00	1.924.613.524.517,00	1.951.267.446.232,85	2.088.941.497.868	2.069.612.267.000,57
Retribusi Daerah	805.090.775,00	1.020.834.115,00	874.194.575,00	870.571.800,00	847.602.400	891.949.811,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	93.923.341.444,00	96.338.516.913,54	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	109.070.217.574	109.790.680.460,56
Lain-lain PAD yang Sah	28.120.148.064,00	34.185.798.108,70	81.926.521.502,00	105.497.499.242,47	88.882.419.816	100.301.303.874,52
PENDAPATAN TRANSFER	3.805.740.337.243,00	3.794.855.660.531,00	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	3.478.957.842.587	3.463.926.176.823,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.804.935.291.933,00	3.794.050.615.221,00	3.286.028.793.852,00	3.256.850.196.484,00	3.478.121.936.167	3.463.090.270.403,00
PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN			1.962.429.140.369,00	1.933.250.543.001,00	2.024.519.971.944	2.009.488.306.179,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			1.323.599.653.483,00	1.323.599.653.483,00	1.453.601.964.223	1.453.601.964.224,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	805.045.310,00	805,045,310,00	871.293.490,00	871.293.490,00	835.906.420	835.906.420,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.576.500.000,00	7.321.573.929,77	7.240.500.000,00	10.042.044.758,72	7.605.500.000	7.955.658.016,00
Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.141.630.000,00	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	7.605.500.000	7.950.630.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	179.943.929,77	-	2.557.449.758,72		5.028.016,00

Sasaran strategis BPKA pada tahun 2017 - 2022 mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Secara keseluruhan capaian kinerja BPKA sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja sasaran optimalisasi aset Pemda DIY tidak sesuai target. Berbagai upaya telah dilaksanakan BPKA DIY untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sasaran OPD BPKA DIY diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi aset-aset pengelola barang milik daerah.

RENSTRA BPKA DIY tahun 2017 - 2022 yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY tahun 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika perubahan peraturan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka perlu dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran dokumen perencanaan. Melalui dokumen perencanaan ini akan diketahui keterkaitan antara sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan antar kegiatan.

Selain itu sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, maka penyesuaian yang dilakukan sampai pada level program kegiatan dan sub kegiatan. Untuk itu, indikator kinerja beserta realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027..

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh BPKA DIY dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan maupun kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

➤ Faktor Eksternal

Secara umum analisis terhadap faktor eksternal bertujuan untuk memetakan tantangan dan peluang yang dihadapi BPKA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Peluang (opportunities)

- Meluasnya kanal pembayaran digital antara lain *e-wallet, market place* dan *ecommerce*. Yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah
- Adanya penambahan objek pajak baru berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu pajak alat berat dan opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Berkembangnya media social sehingga penyebaran informasi terkait pajak dan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Meningkatnya kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
- Meningkatnya efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
- Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset.
- Aset BMD *idle* (tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas fungsi) pada OPD yang belum optimal dalam pemanfaatannya
- Potensi lain-lain PAD yang sah yang dapat menunjang pendapatan Pemda DIY.
- Pelaksanaan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan keuangan akan dimungkinkan melalui SIPD. Sehingga sumber data dan ketersediaan data dapat diketahui secara *realtime* dan efektif serta efisien.
- Peluang SMK untuk dapat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memungkinkan pengelolaan keuangan di dalamnya dilakukan secara lebih fleksibel sehingga berpotensi menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

b. Tantangan/ancaman/hambatan (threats)

- Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat yang semakin melekat teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan publik ;
- Mengidentifikasi aset-aset idle di lingkungan Pemda DIY yang potensial dapat dioptimalkan;
- Menyediakan Penilai Pemerintah dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah terutama untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
- Pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset.

- Sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah maka perlu untuk memiliki aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan Pemda sebagai aplikasi pendamping.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
- Optimalisasi obyek-obyek PAD baru.
 - Sistem informasi penatausahaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah (SIPD RI) masih belum sempurna.
 - Penurunan penerimaan dari Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena adanya opsen PKB dan Opsen BBNKB sehingga harus mencari alternatif pendapatan dari sektor lainnya.
 - Nilai Jual Alat Berat yang sulit didapatkan
 - Menurunnya besaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor
 - Adanya kebijakan penggunaan energi terbarukan
 - Kebijakan Nasional/Visi dan Misi Kepala Negara yang baru, memungkinkan kebijakan yang berbeda untuk Pemerintah Daerah. Sehingga daerah pun menyesuaikan terhadap kebijakan tersebut.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, demikian pula BPKA DIY sebagai institusi pengelola keuangan dan aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka BPKA DIY dengan dukungan APBD DIY akan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

➤ Faktor Internal

Analisis terhadap faktor internal bertujuan untuk memahami kondisi perangkat daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kekuatan maupun kelemahan agar dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan (strengths)

- Koordinasi yang baik antara BPKA dengan OPD berpendapatan.
- Adanya kebijakan Insentif sebagai pendorong kinerja bagi OPD berpendapatan.
- Pajak kendaraan bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam PAD.
- Kemudahan pembayaran pajak maupun retribusi melalui sistem online atau *electronic payment*.

- Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah.
- Mekanisme penarikan pendapatan cukup jelas.
- Produktivitas organisasi yang cukup baik;
- Penetapan peraturan yang mendukung optimalisasi kinerja BUMD dan BUKP;
- Koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya TAPD Kabupaten/Kota dalam hal pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

a. Kelemahan (weakness)

- Keraguan OPD pengelola pendapatan untuk mengoptimalkan objek pendapatan dikarenakan tidak adanya mandat dalam uraian tugas pokok dan fungsi OPD;
- Tidak adanya program dan kegiatan di OPD pengelola pendapatan yang mengarah secara khusus untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah;
- Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di OPD berpendapatan statusnya belum jelas dan kurang terpelihara;
- Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah/retribusi berada jauh dari pengelola sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah.

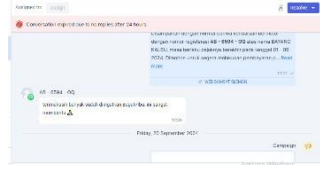
Inovasi yang dilakukan untuk menunjang kinerja serta pelayanan publik selama tahun 2023-2024 sebagai berikut :

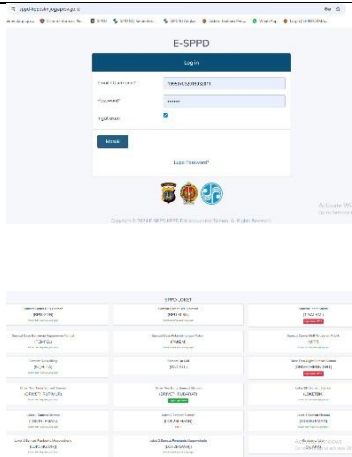
Tabel 10. Daftar Inovasi Tahun 2023

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
KPPD DIY DI KOTA YOGYAKARTA			
1.	Layanan Go Jak (Go Pajak)	Layanan jemput bola penagihan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang menunggak/terlambat sesuai dengan data tunggakan hasil pendataan pada periode tertentu. Go-Pajak juga melayani pembayaran pajak tahunan online se-DIY.	 

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
2.	Layanan Go-Door Pak Mo (Go Door To Door Pake Motor)	Layanan jemput bola penagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak/terlambat. Go-Door Pak Mo juga melayani jemput bola pembayaran pajak tahunan bagi wajib pajak difabel dan lansia langsung ke lokasi/rumah wajib pajak.	
3.	Layanan Samoli (Samsat Mobile Lima Tahunan)	Layanan Kesamsatan dalam pengurusan Perpanjangan STNK 5 Tahunan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Bus Samsat Keliling. Untuk TNKB (plat nomor) dapat dikirim melalui jasa pengiriman online atau dapat diambil di Kantor Samsat Kota Yogyakarta	
4	Layanan Pajak Goes To School	Layanan jemput bola penagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak di area sekolah dan kampus di Kota Yogyakarta	 
KPPD DIY DI KABUPATEN SLEMAN			

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
1.	Layanan TEBAR SALAM (Terima Pembayaran Sampai Malam) dan Layanan Night Drive Thru pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	Pembayaran pajak tahunan sore hari di Samsat Sleman dilayani dengan Layanan Night Drive Thru, sedangkan layanan pembayaran pajak tahunan sore hari di Samsat Pembantu Maguwoharjo dikenal dengan Layanan Tebar Salam. Mekanisme layanan Night Drive Thru mengharuskan wajib pajak mengantri dengan kendaraannya, sehingga tidak perlu turun dari kendaraan. Layanan Tebar Salam di Samsat Maguwo seperti layanan reguler pada pagi hari, wajib pajak dipersilakan untuk masuk ke ruang layanan utama Samsat Pembantu Maguwo. Layanan Pembayaran pajak tahunan sore hari tersebut melayani pembayaran pajak tahunan untuk seluruh kendaraan dengan nomor polisi AB yang memenuhi persyaratan yakni STNK asli dan Kartu Identitas Asli (KTP/SIM/KK asli). Jam Layanan Night Drive Thru dan Tebar Salam: Senin - Jumat : 16.00 - 19.30 WIB.	   
2.	Layanan SAMCALL (Samsat on Call) pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	Layanan Samsat On Call bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan waktu pembayaran yang fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Samsat Sleman, petugas Samsat Sleman yang akan datang ke Kantor, Pabrik, Komunitas maupun kelompok-kelompok lainnya, hanya dengan syarat memenuhi 10 kendaraan sebagai persyaratan minimal untuk menghadirkan Samsat on Call.	   

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
3.	Layanan POJOK SIMPATIK pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	Pojok Simpatik adalah layanan informasi kesamsatan, pengaduan atas layanan yang diberikan oleh Samsat Sleman dan sebagai pengendalian atas gratifikasi yang terjadi di lingkungan kerja Samsat Sleman. Wajib Pajak bisa datang ke lokasi Pojok Simpatik di halaman depan Samsat Sleman atau menghubungi petugas Pojok Simpatik pada nomor 0800 1503 999 (Telepon Bebas Pulsa) atau melalui WhatsApp dengan nomor 0817 1725 1041.	 
4.	INFOSAKU (Informasi Masa Berlaku masa Pajak) pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	INFOSAKU adalah layanan dari KPPD Sleman yang akan memberikan pesan pengingat masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang akan segera berakhir. Pesan pengingat tersebut akan disampaikan melalui WhatsApp pada satu bulan sebelum jatuh tempo pajak kendaraan berakhir. INFOSAKU bertujuan untuk mencegah pemilik kendaraan lalai atau lupa untuk membayar pajak yang akan menyebabkan terkena sanksi administrasi dan bunga pajak. Jika nomor WhatsApp sudah terdaftar di Infosaku, maka pada pembayaran pajak tahun berikutnya pemilik kendaraan akan mendapatkan pesan informasi masa berlaku pajak kendaraan yang akan segera berakhir. Pesan tersebut akan memuat berakhirnya masa berlaku pajak kendaraan dan link tentang persyaratan maupun lokasi pembayaran pajak yang tersedia.	   

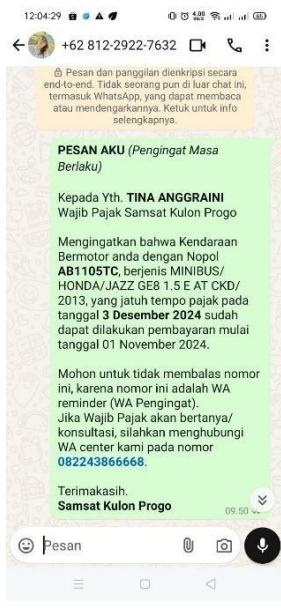
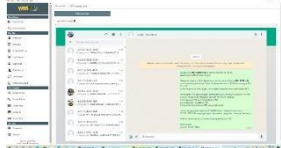
No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
5.	SI TANGGO (Tagih Tonggo) pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	Si Tanggo merupakan inovasi yang ada di KPPD Sleman, dimana inovasi ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan optimalisasi penagihan potensi pajak kendaraan bermotor. Karena keterbatasan petugas penagihan untuk melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak, maka semua karyawan dan karyawan yang ada di KPPD Sleman diberikan tugas untuk melakukan penagihan ke tetangga atau yang berada dekat dengan lingkungan sekitar tempat tinggal.	 
6.	E-SPPD pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengembangkan beberapa inovasi guna mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien. Kabupaten Sleman memiliki jumlah wajib pajak yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak di kabupaten/kota di DIY lainnya. Guna memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak tersebut. Banyaknya titik layanan yang disediakan KPPD DIY di Kabupaten Sleman tentu berbanding lurus dengan dokumen administrasi pelaporan dan dokumen SPJ penerimaan yang perlu dipersiapkan KPPD DIY di Kabupaten Sleman setiap harinya. Para	

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
		petugas di titik layanan setiap bulannya membuat laporan tersebut secara manual. Tidak jarang terjadi kekeliruan serta kekurangan berkas pada laporan bulanan tersebut yang menyebabkan tidak akuratnya laporan bulanan serta bertambahnya waktu administrasi pelaporan dan dokumen SPJ Penerimaan. Berawal dari isu tersebut, teretusnya inovasi berupa aplikasi E-SPPD. Aplikasi E-SPPD merupakan aplikasi yang merangkum seluruh laporan harian setiap titik pelayanan di KPPD DIY di Kabupaten Sleman. Aplikasi E-SPPD merubah proses pembuatan laporan yang awalnya manual menjadi otomatis secara daring (online). Beberapa dokumen yang otomatis dibuat oleh aplikasi E-SPPD ini antara lain Daftar Hadir, Laporan Rekap Notice, dan Laporan Rekap SPPD. Aplikasi E-SPPD mengurangi risiko ketidakakuratan laporan, ketidaklengkapan dokumen, serta mempersingkat waktu pembuatan dokumen yang akhirnya mempermudah kelengkapan administrasi pelaporan dan dokumen SPJ penerimaan.	
KPPD DIY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL			
1.	Layanan BAJAK SAWAH (Bayar Pajak Sawayah-Wayah)	Layanan BAJAK SAWAH (Bayar Pajak Sawayah-Wayah) pada KPPD DIY Di Kabupaten Gunungkidul Pelayanan pembayaran pajak tahunan sampai malam hari bertempat di Sambipitu. Layanan ini menggunakan bus samsat keliling.	

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
2.	Gertak Pak Kades (Gerakan Taat Pajak bersama Kader Desa)	Gertak Pak Kades (Gerakan Taat Pajak bersama Kader Desa) pada KPPD DIY Di Kabupaten Gunungkidul. Inovasi untuk mengurangi tunggakan pajak dengan suatu gerakan agar masyarakat wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan melibatkan Perangkat Desa untuk terlibat dan terjun langsung sebagai ujung tombak untuk melaksanakan penagihan terhadap masyarakat wajib pajak yang masih menunggak atau belum melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melewati tanggal jatuh tempo.	
3.	Samsat x McD (Mudah, cepat, dan dekat)	Samsat x McD (Mudah, cepat, dan dekat) pada KPPD DIY Di Kabupaten Gunungkidul, Samsat Gunungkidul bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu kapanewon dan kalurahan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, dan dekat. Bentuk kerja sama tersebut adalah dengan adanya 14 titik layanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul.	
4.	Minggu Ceria	Minggu Ceria pada KPPD DIY Di Kabupaten Gunungkidul, Pelayanan Kesamsatan Pembayaran PKB Tahunan yang berlokasi di Alun-Alun Wonosari pada Minggu pagi pukul 07.30 s.d. 10.00 WIB merupakan pelayanan terbaru yang diluncurkan pada Januari 2022 dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan slogan McD (Mudah, Cepat, dan Dekat).	
KPPD DIY DI KABUPATEN BANTUL			

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
1.	Pak Matun lan Si Cemol	Pajak Kendaraan Lima Tahunan dan registrasi kendaraan dengan cek fisik mobile. Layanan Kesamsatan dalam pengurusan Perpanjang STNK 5 Tahunan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor <i>mobile</i> melalui Bus Samsat Keliling. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan di tempat yang telah ditentukan tanpa harus datang ke Samsat Induk Bantul ataupun Samsat Pembantu Sewon untuk melakukan cek fisik kendaraan.	  
2.	Jempol Si Panda	Layanan JEMPOL SIPANDA (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan) pada KPPD DIY Di Kabupaten Bantul. Sistem Jemput Bola yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kapanewon / Kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul. Koordinasi ini didasarkan pada data tunggakan pajak kendaraan. Setelah dilaksanakan koordinasi, KPPD Bantul mendatangi Kapanewon / Kalurahan untuk melakukan pelayanan penagihan di tempat.	 
3.	Mas Ijat	Informasi pengingat jatuh tempo. Layanan Mas Ijat memberikan pesan pengingat masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang akan segera berakhir. Pesan pengingat tersebut akan disampaikan melalui WhatsApp pada satu bulan sebelum jatuh tempo pajak kendaraan berakhir.	
KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO			

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
1.	MITAYANI	MITAYANI (Melalui Telepon Kita Melayani) Merupakan inovasi pelayanan dengan sistem jemput bola, dimana wajib pajak bersangkutan menghubungi petugas KPPD DIY di Kulon Progo untuk datang ke kediaman wajib pajak untuk melaksanakan proses pengesahan pajak kendaraan bermotor satu tahunan. MITAYANI dilakukan apabila terdapat minimal 10 wajib pajak yang hendak membayar atau 1 wajib pajak apabila yang bersangkutan telah terlambat membayarkan pajaknya.	  
2	PIKANTUK EMAS	PIKANTUK EMAS (Program Edukasi Kesamsatan Untuk Pelajar Menengah Atas) merupakan inovasi edukasi bagi pelajar SMA/SMK dengan tema penggabungan 3 (tiga) instansi yaitu Polri, KPPD DIY di Kulon Progo dan Jasa Raharja. Tema edukasi PIKANTUK EMAS meliputi pengenalan pajak yang dipungut oleh KPPD Kulon Progo, cara melakukan pajak, manfaat pajak, penguatan integritas, pengenalan jenis kendaraan, safety riding, rambu lalin, jenis penerima santunan jasa raharja, cara mengklaim santunan jasa raharja dan pencegahan kecelakaan. PIKANTUK EMAS dilaksanakan di sekolah-sekolah terutama pada saat MPLS atau acara tertentu dari pihak sekolah di Kabupaten Kulon Progo.	   

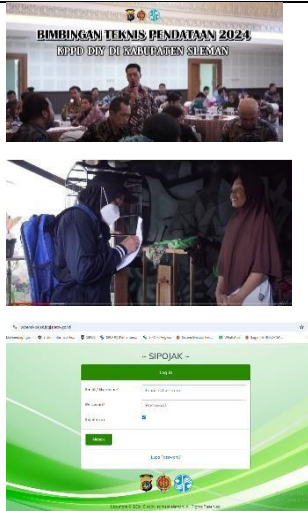
No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
3	TAKON AKU	Inovasi TAKON AKU (Kontak Online Admin Samsat Kulon Progo) merupakan inovasi yang berupa WA Chatbot. Inovasi ini dapat memungkinkan masyarakat untuk mengakses jawaban dari beberapa FAQ yang paling sering ditanyakan oleh wajib pajak kapanpun dan dimanapun tanpa terikat jam operasional kantor. Save WA Center kemudian kirim pesan dengan kode "TAKON AKU" maka akan muncul pilihan lalu tinggal pilih dengan memasukan angka sesuai jawaban yang akan dicari.	
4	PESAN AKU	Inovasi PESAN AKU (Pesan Peningat Masa Berlaku) merupakan inovasi melalui WA blasting untuk mengingatkan jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis. Kesibukan WP yang bermacam-macam dapat menyebabkan lupa dalam melakukan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga PESAN AKU sangat membantu mengingatkan WP dan meminimalisir tunggakan.	
5	SUPER MEWAH	SUPER MEWAH (Surat Pemberitahuan Melalui WhatsApp Harian) merupakan inovasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan melakukan pemberitahuan bahwa kendaraan terlambat bayar melalui WA blasting. SUPER MEWAH merupakan replikasi dari surat SUPER KPKB (Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor) yang biasanya dilaksanakan melalui pengiriman pada kantor POS atau swakelola oleh Kalurahan - Kelurahan.	

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
6	BLOKLINE	BLOKLINE (Blokir Online) merupakan inovasi Pemblokiran Kendaraan Bermotor melalui Google Form dengan mengupload form pemblokiran dibubuhi tanda tangan dan materai serta upload KTP atau KK pemilik kendaraan dan Swafoto. Form pemblokiran bisa diakses melalui link di inovasi TAKON AKU.	
7	SAMOLING MINGGU WAGE	SAMOLING MINGGU WAGE (Samsat Mobil Keliling Minggu Wage), layanan pada hari libur untuk memenuhi kebutuhan WP di sebuah pasar tradisional yang sangat ramai. Pasar Wagean merupakan pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo yang satu-satunya menjadi sentra perdagangan barang apapun. Sehingga keberadaan pasar ini sangatlah diminati bahkan oleh wilayah diluar Kabupaten Kulon Progo. Meskipun setiap Pasaran Wage di hari kerja sudah melakukan pelayanan akan tetapi pada hari minggu jumlah pengunjung pasar ini mencapai 3x lipat dari hari biasa.	

DAFTAR INOVASI TAHUN 2024

No	Nama Inovasi	Keterangan	Foto
KPPD DIY DI KOTA YOGYAKARTA			
1.	Cetak TNKB di Samoli (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Samoli)	Pengembangan dari layanan Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli) dengan menyertakan alat pencetak TNKB (plat nomor kendaraan) di lokasi Bus Samsat sehingga memudahkan wajib pajak dalam pengurusan pajak lima tahunan	  

2	WA Blasting	Layanan reminder jatuh tempo dan penagihan bagi WP yang menunggak melalui Whatsapp	
KPPD DIY DI KABUPATEN SLEMAN			
1.	Si JELITA (Sistem Jemput Lima Tahunan) pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	<u>Layanan SI JELITA (Sistem Jemput Lima Tahunan) yang melayani pembayaran pajak 5 tahunan</u> tanpa harus datang ke Samsat Sleman, petugas Samsat Sleman akan datang ke lokasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk dapat menghadirkan layanan SIJELITA minimal ada 10 kendaraan yang akan dibayarkan pajak 5 tahunan. Permohonan layanan SI JELITA dapat dilakukan dengan mengisi form permohonan pada <u>FORM SIJELITA</u> di web Samsat Sleman setelah mengisi form maka pemohon akan menerima salinan surat permohonan pada email yang terdaftar, untuk konfirmasi salinan permohonan tersebut discreenshoot dan kirim ke admin Samsat Sleman melalui https://wa.me/62085257782930 . Admin Samsat Sleman akan menyampaikan permohonan kepada Petugas SI JELITA untuk verifikasi permohonan yang disampaikan.	  

2.	Si POJAK (Sistem Informasi Potensi Pajak) pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman memiliki kegiatan rutin tahunan untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pajaknya pada tahun yang lalu. Kegiatan Pendataan bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini kepemilikan kendaraan bermotor potensi tahun sebelumnya. Terdapat 9 kriteria kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan kegiatan pendataan potensi pajak kendaraan bermotor, KPPD DIY di Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan se-Kabupaten Sleman. KPPD DIY di Kabupaten Sleman sebagai pelaksana program, menyiapkan <i>database</i> pada aplikasi pendataan (Si POJAK), sedangkan pemerintah kalurahan sebagai pelaksana lapangan yang melakukan pendataan secara <i>door to door</i>. Pemerintah Kalurahan menugaskan perangkat desa untuk melakukan pendataan potensi pajak kendaraan dengan datang secara langsung ke alamat pemilik kendaraan.	
----	---	---	---

3.	Jejaka (Jemput Pajak Anda) pada KPPD DIY DI Kabupaten Sleman	Layanan jemput bola penagihan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak/terlambat langsung ke lokasi/rumah wajib pajak.	 
KPPD DIY DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL			
1.	SAMSAT KALURAHAN LIMA TAHUNAN (SALIMAN)	Peningkatan layanan kesamsatan melalui dibukanya Pengesahan Ulang 5 Tahunan pada titik layanan yang tersebar di beberapa Kalurahan, dalam hal ini Samsat Desa/Kalurahan, dan selanjutnya diberi nama SALIMAN "Samsat Kalurahan Lima Tahunan"	
KPPD DIY DI KABUPATEN KULON PROGO			
1.	MITAYANI 5 TAHUNAN (Melalui Telepon Kita Melayani Pajak 5 Tahunan)	Merupakan inovasi pelayanan dengan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi tempat wajib pajak untuk melaksanakan proses pajak kendaraan bermotor 5 tahunan dengan minimal 10 wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, petugas Samsat Kulon Progo akan melakukan Cek Fisik Kendaraan beserta pembayaran PKB dan PNPB kemudian pada hari berikutnya petugas akan	  

		mengirimkan STNK beserta plat nomor.	
2	SICERMAT	SICERMAT (Sistem Cetak Formulir Lima Tahunan) merupakan inovasi percepatan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dimana WP tidak perlu mengisi form pajak 5 tahunan yang membutuhkan waktu 5 s/d 10 menit apabila diisikan secara manual. Inovasi ini juga sangat membantu bagi kalangan yang memiliki keterbatasan dalam menulis.	
3	DIFAKU	DIFAKU (Drive thru Difabel Samsat Kulon Progo) merupakan inovasi khusus untuk pelayanan kendaraan difabel roda 3 atau sejenisnya. Tujuan inovasi ini untuk memudahkan WP disabilitas melakukan Pajak Kendaraan Bermotor tanpa turun dari kendaraan dan letak pelayanan DIFAKU berada pada lobi gedung KPPD DIY di Kulon Progo yang sangat terjangkau dari pintu masuk dan keluar gedung.	

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Dinamisasi regulasi atas pengelolaan keuangan dan pelaporan
- Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
- Perlunya pengklasifikasian dan pencermatan potensi PAD yang bisa dibuatkan payung hukum dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal sepenuhnya dilaksanakan sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Mengurangi potensi penyalahgunaan atas anggaran kegiatan

1. Visi Misi

Visi Gubernur DIY sebagaimana dinyatakan dalam Ranwal RPJMD 2022-2027 yaitu Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dengan rumusan Visi tersebut, kemudian dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Adapun misi yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPKA pada tahun 2022-2027 mengacu kepada Misi Ke-3, yaitu Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

Selanjutnya mengacu pada visi misi Pemda, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027:

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Pemda DIY tahun 2022-2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38(A)(2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK

Sumber : RPJMD Pemda DIY tahun 2022-2027

Menurut Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Ketentuan pada Perdais tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Adapun sebagai tindak lanjut dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tugas fungsi KPPD DIY yang semula mengacu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY.

Tugas dan fungsi BPKA terkait langsung dengan tujuan Pemda DIY yaitu Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good government*) dengan sasaran Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dan indikator sasaran Opini BPK. Dukungan tugas dan fungsi BPKA sebagai berikut :

Tabel 12. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dan Rincian Tugas Fungsi BPKA DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemerintah Daerah	Urusan/Tugas/Fungsi BPKA
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Urusan: Penunjang Pemerintah : Keuangan Tugas : menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

a. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RENSTRA dilakukan telaah terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPKAD Kabupaten/Kota di DIY. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan BPKAD Kabupaten/Kota di DIY terutama yang terkait langsung dengan pelayanan BPKA DIY. Sasaran Kementerian Dalam Negeri dalam RENSTRA 2020 - 2024 yang terkait dengan ketugasan BPKA DIY yaitu : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Sedangkan sasaran RENSTRA Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 yang terkait dengan ketugasan BPKA DIY di antaranya meliputi : perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan serta Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

Prioritas dalam Renstra K/L dan Strategi dalam Renstra Provinsi tersebut diatas menjadi salah satu acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan pajak daerah dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan dan pengelolaan keuangan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan dan pengelolaan di daerah adalah keselarasan dan transparansi rencana pembangunan dan pengelolaan nasional dengan rencana kerja daerah.

b. Telaahan Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya pelayanan kepada masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan terkait Tata Ruang Wilayah maupun Kajian Lingkungan Hidup. Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKA DIY tidak ada ketugasan dan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan kebijakan dalam tata ruang wilayah maupun kajian lingkungan hidup. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas

fungsi, khususnya dalam perumusan kebijakan penganggaran daerah, perlu diperhatikan analisis tata ruang wilayah maupun kajian lingkungan hidup, apalagi dengan adanya rencana pembangunan gedung KPPD DIY di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Penyusunan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

c. Penentuan Isu Strategis

Dalam menjalankan fungsinya, BPKA DIY menghadapi beberapa isu strategis yang harus diantisipasi dan dikelola diantaranya terkait dengan pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pembinaan keuangan daerah, dalam hal ini peran BPKA sebagai Pembina BUMD dan BUKP. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BPKA dalam meningkatkan pelayanan. Isu-isu strategis yang muncul antara lain adalah implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. dalam pengimplementasiannya, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. pada tahun 2024 telah diimplementasikan pemungutan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Sedangkan dalam rangka pemungutan pajak alat berat langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pendataan atas seluruh alat berat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemungutan pajak alat berat. Pada tahun 2025 Pemda DIY akan melakukan Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan juga Opsen MBLB. Persiapan yang telah dilakukan adalah dengan menyiapkan aplikasi pemungutan pajak terkait dengan akan dilakukan *split payment* dalam penerapan opsen. menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan serta melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten / Kota. Dengan diterapkannya Opsen Pajak akan akan berdampak kepada penerimaan daerah khususnya yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan fungsi BPKA sebagai Pengelola Barang Milik Daerah, isu strategis yang muncul adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal. Dalam optimalisasi pemanfaatan ini berdasar pasal 78 Permendagri 19 tahun 2016 diamanatkan untuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga tindak lanjutnya perlu dilaksanakan proses roadmap pemanfaatan barang yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut. langkah yang diambil dengan inventaris barang yang dipergunakan sesuai kebutuhan pengguna barang kemudian dilakukan kajian arah

pemanfaatan. dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemanfaatan sehingga bisa optimal menambah PAD dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

BPKA memiliki fungsi sebagai Pembina BUMD yang dimiliki Pemda DIY, yaitu: PT Taru Martani, PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, Perumda Air Bersih Tirtatama dan Badan Usaha Kredit Pedesaan. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, BUMD di DIY berkinerja baik dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah DIY dalam bentuk deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rekening Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kontribusi BUMD dalam mencapai target sasaran pembangunan perlu dioptimalkan dengan pembinaan yang dilakukan oleh BPKA DIY. Berikut ini disampaikan informasi terkait penyertaan modal dan return on assets BUMD di DIY :

Tabel 13. Penyertaan Modal BUMD DIY

No	BUMD	Modal Dasar	Modal Disetor (s.d tahun 2022)	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
1	PT. TARU MARTANI	50.000.000.000	49.990.500.000	-	-	-	-	-
2	PT. AMI	50.000.000.000	31.144.910.000	-	-	-	10.000.000.000	18.845.090.000
3	PT. BANK BPD DIY	4.000.000.000.000	1.081.175.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	358.825.000.000	-	-
4	Perumda Air Bersih Tirtatama	469.028.716.201	176.396.691.000	292.632.025.201	-	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
5	BUKP	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6	PT Asuransi Bangun Askrida	3.900.000.000	1.190.000.000	-	1.084.000.000	542.000.000	542.000.000	542.000.000

Sumber : RPJMD DIY Tahun 2022-2027

Tabel 14. Return on Assets BUMD DIY

Nama BUMD	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PT Bank BPD DIY	1.86	1.99	1.64	1.71	1.66	1.62
PT Taru Martani	1.48	0.69	13.55	17.50	12.94	10.30
PT AMI	11.32	9.58	6.47	6.84	2.84	1.33
PDAB Tirtatama	-	-	-0.04	-6.36	-6.84	-4.07
BUKP DIY	4.63	4.42	4.04	2.69	0.53	2.01

Sumber : RPJPD DIY Tahun 2025-2045

Secara substansi, isu strategis yang dimiliki yaitu sebagai berikut :

- ✓ Pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi pelaporan yang cenderung dinamis mengikuti regulasi yang ada
- ✓ Penggunaan Cash Management System (CMS) pada penatausahaan keuangan dalam mekanisme pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pembayaran belanja.
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbanyak layanan berbasis

elektronik payment point online dan sistem informasi pendapatan daerah, selain tentunya pemeliharaan/perbaikan dan penambahan sarana prasarana.

- ✓ Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang bernilai ekonomis dengan memaksimalkan pengelolaan jumlah aset daerah yang optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
- ✓ Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah serta badan usaha kredit pedesaan melalui upaya-upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 5 (lima) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, tugas yang diampu oleh BPKA DIY yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk itu tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam RENSTRA 2022-2027 adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”.

Pengertian transparan menurut Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1) yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabel sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5) yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka BPKA DIY harus menjadi institusi pengelola keuangan dan aset daerah yang bisa memberikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Optimalisasi aset-aset Pemda DIY

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Pemda DIY dan Perangkat Daerah BPKA DIY beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Pemda DIY tahun 2022-2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38(A)(2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK

Indikator tujuan dan sasaran BPKA DIY kami sampaikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 16. Tujuan, indikator tujuan/sasaran BPKA DIY tahun 2022-2027

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				Baseline (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Tahun 5 (2027)
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Transparan : yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1)) Akuntabel : yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat (Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5))	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran :									
1.	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (82,73)	A (94,41)	A (94,89)	A (95,00)	A (95,20)	A (95,50)

2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Meningkatnya PAD (20%) APBD yang tepat dan akurat (20) Laporan keuangan daerah yang akuntabel (20%) Penatausahaan Keuangan daerah yang akurat (20%) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (20%).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Optimalisasi aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Nilai rupiah optimalisasi BMD	15.486.233.611	9.016.589.475	9.378.609.475	9.703.109.475	10.003.409.475	10.312.409.475

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional yang berisi upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan sasaran perangkat daerah. Strategi yang digunakan BPKA DIY tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk strategi optimalisasi BMD *idle* ini dimaksimalkan dengan metode kerjasama pemanfaatan (KSP) yang bisa memberikan optimalisasi pendapatan dan pemeliharaan dari BMD sesuai dengan pasal 169 permendagri 19 tahun 2016.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2022-2027, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Selanjutnya arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BPKA mendukung Arah Kebijakan Pembangunan DIY Tahun 2025-2045 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, khususnya misi pertama, yaitu mewujudkan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif melalui transformasi tata kelola untuk memastikan ketaatan azas, kelembagaan yang efektif, proses bisnis yang adaptif, aparatur yang berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, transformasi digital, integritas partai politik serta relasi yang baik antara pemerintah dan

masyarakat sipil. Sesuai dengan tatakala waktu Perubahan Renstra, maka berfokus pada tahap Tahap I di tahun 2025-2029 yaitu Penguatan kelembagaan pemerintahan yang adaptif, perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, serta penguatan demokrasi. Tahap I ini merupakan fondasi pembangunan yang menjadi dasar transformasi ekonomi DIY. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk meningkatkan produktifitas ekonomi terutama pada sektor strategis. Pertumbuhan sektor ekonomi ini perlu didukung oleh peran BUMD dengan mengisi aspek yang belum disentuh oleh sektor swasta. Pengelolaan BUMD mesti dilakukan secara professional sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Produktifitas BUMD perlu diupayakan melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan secara optimal serta menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Tabel 17. Pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Melakukan implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan mengembangkan hubungan keuangan dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terpadu	1.	Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan 1. Menyusun regulasi sebagai dasar hukum pemungutan pendapatan daerah. 2. Mempersiapkan Sistem Aplikasi Perpajakan guna mendukung pelaksanaan Opsen Pajak 3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan melalui peningkatan fasilitas infrastruktur 4 Penggunaan media sosial untuk sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah. 1. Sosialisasi kepada Perangkat daerah untuk Melaksanakan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		4. Mengimplementasikan Permendagri No 79 tahun 2022 tentang Petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD dan pergub DIY No 1 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kkpd untuk pelaksanaan APBD dan Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Transaksi Non Tunai.	2.	Mengoptimalkan transaksi non tunai dengan sarana yang tersedia.sesuai dengan Instruksi Gubernur No 4 Tahun 2023
		5. Meningkatkan kontribusi BUMD dan BUKP dalam perekonomian daerah yang bermanfaat bagi masyarakat	1. 2.	Melaksanakan pembinaan terkait peningkatan kinerja, kapasitas dan produktifitas BUMD Penguatan kelembagaan BUMD dan BUKP
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Meningkatkan tata kelola barang milik daerah dan pemanfaatan aset yang bernilai ekonomis untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah	1. 2. 3.	Melakukan penilaian potensi BMD dan menyusun mekanisme pemanfaatan Menyusun kajian komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Identifikasi terhadap potensi-potensi optimalisasi atas barang milik daerah yang berada di OPD atau Pengguna
	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan	1. 2. 3.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, pengelolaan sumberdaya manusia dan informasi publik. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Mengoptimalkan capaian kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan Urusan Penunjang, yaitu Urusan Keuangan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA DIY. Proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini BPKA DIY) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Gubernur, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai dengan kerangka logis RPJMD DIY tahun 2022 – 2027. Indikator program Pemda dan BPKA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 18. Program Pemda dan Indikator Program Pemda tahun 2022 - 2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good Government</i>)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38(A)(2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tabel 19. Program dan Indikator Program BPKA DIY tahun 2022 - 2027

Program Pemda	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur
	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 20. Target dan Meta Indikator Program

No	Program	Indikator Program	Meta Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Tahun 5 (2027)	
1	Program Pengelolaan	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai	1. Ketepatan waktu dan kesesuaian program dan kegiatan KUA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Program	Indikator Program	Meta Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Tahun 5 (2027)	
	Keuangan Daerah	dengan peraturan perundang-undangan	PPAS, RAPBD dan APBD (dengan bobot 25%) 2. Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawaban APBD (dengan bobot 25%) 3. Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah (dengan bobot 25%) 4. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (dengan bobot 25%)							
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Jumlah PAD dibagi jumlah pendapatan yang belum ditentukan peruntukan belanjanya (non-Earmark x 100%)	60,75%	57,92%	58,98%	51,94%	52,88%	53,85%	53,85%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	1. Ketepatan waktu penetapan RKBMD dgn bobot 20% 2. Ketepatan waktu & kelengkapan pelaporan BMD (ketepatan waktu 60%, kelengkapan laporan 40%) dgn bobot 20% 3. BMD idle yg dioptimalkan dgn bobot 15% 4. Kelengkapan dokumen administrasi pemindahtanganan & penghapusan BMD dgn bobot 15% 5. Ketepatan waktu penetapan peraturan Gubernur tentang SSH pada minggu kedua Bulan Juli n-1 dgn bobot 20% 6. Kelengkapan tanda kepemilikan barang milik daerah dengan bobot 10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor nilai PKKI	92,67	85,86	85,90	85,95	86,00	86,50	88.50

Tabel 21. Anggaran Pendapatan BPKA DIY Tahun 2022-2027

URAIAN	Anggaran Pendapatan					
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
PENDAPATAN DAERAH	5.348.583.615.350	5.774.305.080.245	5.825.466.993.017	4.941.624.656.991	5.609.661.533.947	5.623.438.195.611
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.054.443.028.008	2.287.741.737.658	2.268.419.049.774	1.624.355.794.360	1.669.833.954.457	1.732.423.071.121
Pajak Daerah	1.865.533.536.818	2.088.941.497.868	2.059.869.703.526	1.462.082.788.059	1.501.135.086.270	1.556.733.811.270
Retribusi Daerah	874.194.575	847.602.400	895.195.700	908.619.875	962.020.725	789.695.025
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113	109.070.217.574	121.749.510.238	123.993.797.426	130.494.347.279	137.019.064.643
Lain-lain PAD yang Sah	81.926.521.502	88.882.419.816	85.904.640.310	37.370.589.000	37.242.500.183	37.880.500.183
PENDAPATAN TRANSFER	3.286.900.087.342	3.478.957.842.587	3.549.191.703.243	3.309.663.362.631	3.932.251.079.490,00	3.883.438.624.490,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.028.793.852	3.478.121.936.167	3.548.207.898.013	3.308.682.436.000	3.931.379.786.000,00	3.882.567.331.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490	835.906.420	983.805.230	980.926.631	871.293.490	871.293.490
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.240.500.000	7.605.500.000	7.856.240.000	7.605.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000
Pendapatan Hibah	7.240.500.000	7.605.500.000	7.856.240.000	7.605.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-		

Penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKA DIY adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2022 - 2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	1.385.130.562.010	100%	1.418.603.328.914	100%	1.398.612.120.089	100%	447.890.410.389	100%	459.393.310.389	100%	471.469.710.389	100%	4.195.968.880.170	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan	100%	100%	3.724.996.000	100%	956.622.200	100%	4.270.000.000	100%	4.480.000.000	100%	4.690.000.000	100%	4.940.000.000	100%	19.336.622.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
		5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	357.190.000	2 Dokumen	78.726.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	650.000.000	10 Dokumen	2.378.726.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	357.190.000	2 Dokumen	77.226.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	650.000.000	10 Dokumen	2.377.226.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	26.793.000	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	29.368.000	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	30 Dokumen	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	644.299.000	30 Dokumen	309.815.600	30 Dokumen	720.000.000	30 Dokumen	730.000.000	30 Dokumen	740.000.000	30 Dokumen	790.000.000	150 Dokumen	3.289.815.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	1.160.543.000	2 Dokumen	222.515.500	2 Dokumen	1.150.000.000	2 Dokumen	1.200.000.000	2 Dokumen	1.250.000.000	2 Dokumen	1.300.000.000	10 Dokumen	5.122.515.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	1.015.303.000	6 dokumen	242.782.000	6 dokumen	1.250.000.000	6 dokumen	1.300.000.000	6 dokumen	1.350.000.000	6 dokumen	1.400.000.000	30 Dokumen	5.542.782.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30 Dokumen	30 Dokumen	134.310.000	30 Dokumen	25.557.100	30 Dokumen	150.000.000	30 Dokumen	150.000.000	30 Dokumen	150.000.000	30 Dokumen	150.000.000	150 Dokumen	625.557.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	513.534.000	100%	256.195.700	100%	758.000.000	100%	760.000.000	100%	761.000.000	100%	762.000.000	100%	3.297.195.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	168.625.000	5 Laporan	83.660.600	5 Laporan	250.000.000	5 Laporan	250.000.000	5 Laporan	250.000.000	5 Laporan	250.000.000	25 laporan	1.083.660.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Kabupaten/Kota																		
		5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5 laporan	5 laporan	167.240.000	5 laporan	83.660.600	5 laporan	250.000.000	5 laporan	250.000.000	5 laporan	250.000.000	5 laporan	250.000.000	25 laporan	1.083.660.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	5 laporan	5 laporan	172.605.000	5 laporan	83.660.600	5 laporan	250.000.000	5 laporan	250.000.000	5 laporan	250.000.000	5 laporan	250.000.000	25 laporan	1.083.660.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota																	
		5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	5.064.000	2 dokumen	5.213.900	2 dokumen	8.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	11.000.000	2 dokumen	12.000.000	10 dokumen	46.213.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	100%	338.088.000	100%	151.970.500	100%	470.000.000	100%	490.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	2.161.970.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	2 Laporan	98.090.000	2 Laporan	89.310.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	10 Laporan	1.139.310.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 Dokumen	8000 Dokumen	239.998.000	8000 Dokumen	62.660.500	8000 Dokumen	220.000.000	8000 Dokumen	240.000.000	8000 Dokumen	250.000.000	8000 Dokumen	250.000.000	40000 Dokumen	1.022.660.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindakan lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan	100%	100%	892.406.500	100%	540.358.700	100%	1.224.000.000	100%	1.224.000.000	100%	1.237.000.000	100%	1.283.000.000	100%	5.508.358.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				sunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD																	
		5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	1	115.643.000	12 Laporan	13.857.800	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	60 laporan	183.857.800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 laporan	2 laporan	23.495.000	2 laporan	17.484.400	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	60.000.000	10 laporan	227.484.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	424.305.750	2 dokumen	340.453.600	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	800.000.000	2 dokumen	800.000.000	10 dokumen	3.540.453.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungj	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan	1 dokumen	1 dokumen	4.975.000	1 dokumen	5.051.600	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	13.000.000	5 dokumen	54.051.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			awaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																	
		5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	1 dokumen	8.871.000	1 dokumen	5.778.400	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	13.000.000	5 dokumen	54.778.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	12.000.000	4 dokumen	41.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	233.081.250	1 dokumen	110.777.200	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	164.000.000	1 dokumen	175.000.000	5 dokumen	749.777.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	150 Orang	150 Orang	48.419.000	80 Orang	16.704.100	80 Orang	100.000.000	80 Orang	100.000.000	80 Orang	100.000.000	80 Orang	110.000.000	400 Orang	426.704.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	7 lembaga	7 lembaga	33.616.500	8 Lembaga	30.251.600	8 Lembaga	50.000.000	8 Lembaga	50.000.000	8 Lembaga	50.000.000	8 Lembaga	50.000.000	8 Lembaga	230.251.600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	100%	100%	1.379.661.537.510	100%	1.416.698.181.814	100%	1.391.890.120.089	100%	440.936.410.389	100%	452.205.310.389	100%	463.934.710.389	100%	4.165.664.733.070	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tuju an	Sasara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung- jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	9 Lapora n	9 Lapora n	1.211.028.500	9 Laporan	792.477.600	10 laporan	2.500.000.000	10 laporan	2.000.000.000	10 laporan	2.050.000.000	10 laporan	2.000.000.000	49 laporan	9.342.477.600	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	DIY
		5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 lapora n	1 laporan	476.888.278.099	1 laporan	584.208.683.900	1 laporan	551.559.609.700	1 laporan	15.000.000.000	1 laporan	15.000.000.000	1 laporan	15.000.000.000	5 laporan	1.180.768.293.600	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	DIY
		5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 lapora n	1 laporan	62.545.932.869	1 laporan	26.021.177.076	1 laporan	20.000.000.000	1 laporan	20.000.000.000	1 laporan	20.000.000.000	1 laporan	20.000.000.000	5 laporan	106.021.177.076	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	DIY
		5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 lapora n	1 laporan	839.016.298.042	1 laporan	805.675.843.238	1 laporan	817.830.510.389	1 laporan	403.936.410.389	1 laporan	415.155.310.389	1 laporan	426.934.710.389	5 laporan	2.869.532.784.794	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	DIY
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	60,75	60,75	10.576.459.336	57,92	7.256.485.200	58,98	15.381.833.090	51,94	14.628.736.310	52,88	15.417.772.441	53,85	16.355.793.516	53,85	69.040.620.557	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan	100%	100%	10.576.459.336	100%	7.256.485.200	100%	15.381.833.090	100%	14.628.736.310	100%	15.417.772.441	100%	16.355.793.516	100%	69.040.620.557	Badan Pengelo la Keuang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.																an dan Aset	
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 dokumen	5 dokumen	1.957.969.000	1 dokumen	2.739.486.000	1 dokumen	5.650.000.000	1 dokumen	4.150.000.000	1 dokumen	4.150.000.000	1 dokumen	4.191.500.000	5 dokumen	20.880.986.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan an Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	96.076.000	1 laporan	77.580.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	207.050.000	5 dokumen	899.630.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen	0		
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	573.436.000	1 laporan	377.129.400	1 laporan	643.000.000	1 laporan	675.000.000	1 laporan	708.000.000	1 laporan	715.080.000	5 Laporan	3.118.209.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	2.222.333.400	60 laporan	1.433.176.900	60 laporan	2.514.519.190	60 laporan	2.734.740.720	60 laporan	2.949.315.592	60 laporan	3.153.594.951	300 Laporan	12.785.347.353	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 laporan	12 laporan	5.726.644.936	60 Laporan	2.615.612.900	60 Laporan	6.197.922.770	60 Laporan	6.679.215.347	60 Laporan	7.206.136.082	60 Laporan	7.887.254.590	300 Laporan	30.586.141.689	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	1 laporan	75.000.000	1 laporan	78.750.000	1 laporan	82.687.500	1 laporan	83.514.375	4 laporan	319.951.875	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	0	2 laporan	13.500.000	2 laporan	96.391.130	2 laporan	106.030.243	2 laporan	116.633.267	2 laporan	117.799.600	10 laporan	450.354.240	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
	Optimalisasi aset Pemda DIY			Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp 15.486.233.611	Rp 15.486.233.611		Rp9.016.589.475		Rp9.378.609.475		Rp9.703.109.475		Rp10.003.409.475		Rp 10.312.409.475		Rp 10.312.409.475		Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100%	100%	4.545.127.500	100%	2.617.409.040	100%	7.450.000.000	100%	6.274.000.000	100%	5.896.000.000	100%	21.100.000.000	100%	31.617.409.040	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik	100%	100%	4.545.127.500	100%	2.617.409.040	100%	7.450.000.000	100%	6.274.000.000	100%	5.896.000.000	100%	21.100.000.000	100%	31.617.409.040	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
		5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	382.640.000	1 Dokumen	415.699.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	750.000.000	5 Dokumen	3.415.699.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	76.211.000	1 Dokumen	69.622.200	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	15.000.000.000	5 Dokumen	869.622.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	233.362.000	2 laporan	154.885.100	2 laporan	800.000.000	2 laporan	800.000.000	2 laporan	850.000.000	2 laporan	850.000.000	10 laporan	3.454.885.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	2laporan	100.000.000	Badan Pengelola Aset dan Daerah Istimewa	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																				Yogyakarta	
		5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	3	2.983.439.500	3 laporan	1.621.752.240	3 laporan	4.500.000.000	3 laporan	3.500.000.000	3 laporan	2.960.000.000	3 laporan	3.150.000.000	15 laporan	18.621.752.240	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	2	576.062.000	2 laporan	208.477.000	2 laporan	500.000.000	2 laporan	500.000.000	2 laporan	500.000.000	2 laporan	600.000.000	10 laporan	2.308.477.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 dokumen	3 dokumen	293.413.000	3 dokumen	146.973.500	3 dokumen	700.000.000	3 dokumen	700.000.000	3 dokumen	700.000.000	3 dokumen	700.000.000	15 dokumen	2.946.973.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintah			Kategori RB Perangkat Daerah	A (82,73)	A (82,73)		A(94,41)		A (94,89)		A (95,00)		A(95,20)		A(95,50)		A(95,50)		Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	ahan di Perangkat Daerah																				
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,67	92,67	100.298.485.389	85,86	96.991.828.632	85,9	120.442.965.909	85,95	221.718.747.820	86	203.754.081.351	86,5	195.836.023.137	86,5	838.743.646.849	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	75.118.000	100%	78.325.300	100%	125.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	648.325.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	23.138.000	8 dokumen	24.373.700	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	50.000.000	32 dokumen	204.373.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	2 dokumen	33.973.000	2 dokumen	34.738.700	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	65.000.000	2 dokumen	65.000.000	10 dokumen	274.738.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Dokumen DPA-SKPD																	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	18.007.000	12 Laporan	19.212.900	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	60 Laporan	169.212.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	100%	100%	81.096.229.644	100%	81.600.199.896	100%	85.296.181.270	100%	99.476.671.001	100%	109.407.943.966	100%	120.320.005.770	100%	496.101.001.903	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				ulanan/Semesteran SKPD																	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 orang/bulan	240 orang/bulan	80.833.073.644	240 Orang/Bulan	81.327.209.896	240 Orang/Bulan	85.003.371.070	240 Orang/Bulan	99.175.668.291	240 Orang/Bulan	109.093.235.120	240 Orang/Bulan	120.002.558.632	240 Orang/Bulan	494.602.043.009	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	72	235.200.000	72 dokumen	241.740.000	72 dokumen	259.310.200	72 dokumen	265.002.710	72 dokumen	276.208.846	72 dokumen	277.447.138	360 dokumen	1.319.708.894	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	16.715.500	1 Laporan	17.750.000	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	20.500.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	23.000.000	5 Laporan	102.250.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	11.240.500	2 Laporan	13.500.000	2 Laporan	14.500.000	2 Laporan	15.500.000	2 Laporan	16.500.000	2 Laporan	17.000.000	10 Laporan	77.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Triwulanan/S emesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD																	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	94.920.000	100%	96.720.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	2.946.720.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	72 Laporan	94.920.000	72 Laporan	96.720.000	72 Laporan	700.000.000	72 Laporan	700.000.000	72 Laporan	700.000.000	72 Laporan	750.000.000	360 Laporan	2.946.720.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD	0	0	0	100%	4.744.900	100%	16.600.000	100%	17.500.000	100%	18.200.000	100%	18.500.000	100%	75.544.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	12 dokumen	4.744.900	12 dokumen	16.600.000	12 dokumen	17.500.000	12 dokumen	18.200.000	12 dokumen	18.500.000	60 dokumen	75.544.900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi	100%	100%	1.816.094.000	100%	1.475.309.100	100%	2.703.109.000	100%	2.822.091.732	100%	2.950.272.196	100%	3.052.549.986	100%	13.003.332.014	Badan Pengelola Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															an dan Aset		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Paket	6 Paket	122.997.000	6 Paket	111.532.500	6 paket	159.958.000	6 Paket	176.664.800	6 Paket	191.384.480	6 Paket	204.306.768	30 Paket	843.846.548	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan																	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	28	419.078.000	28 Paket	376.872.300	34 Paket	501.817.090	34 Paket	540.998.399	34 Paket	581.898.539	34Paket	610.955.313	158 Paket	2.612.541.641	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	246.097.000	36 Paket	189.417.800	36 Paket	273.211.760	36 Paket	289.332.936	36 Paket	329.566.230	36 Paket	350.022.853	180 Paket	1.431.551.579	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	52.729.200	19 Paket	35.857.100	19 Paket	62.173.225	20 Paket	66.644.886	20 Paket	70.803.931	20 Paket	76.666.107	98 Paket	312.145.249	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	308.970.800	16 Paket	215.849.200	16 Paket	310.426.625	16 Paket	313.336.181	16 Paket	316.833.033	16 Paket	322.293.601	80 Paket	1.478.738.640	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	17 Dokumen	17 Dokumen	48.792.000	17 Dokumen	39.208.800	17 Dokumen	55.522.300	17 Dokumen	59.114.530	17 Dokumen	61.785.983	17 Dokumen	65.305.344	85 Dokumen	280.936.957	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tuju an	Sasara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penan ggung- jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01. 1.06.09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Lapora n	72 Lapora n	508.06 6.000	72 Laporan	506.571 .400	72 Laporan	1.180.00 0.000	72 Laporan	1.231.0 00.000	72 Laporan	1.242.00 0.000	72 Laporan	1.258.0 00.000	360 Laporan	5.417.57 1.400	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	DIY
		0.00.01. 1.06.10	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD			54.386 .000		0	5000 Dokume n	70.000.0 00	5300 Dokume n	75.000. 000	5800 Dokume n	85.000.0 00	6000 Dokume n	90.000. 000	22100 Dokume n	320.000. 000	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	DIY
		0.00.01. 1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	54.978 .000	-	0	1 dokume n	90.000.0 00	1 dokume n	70.000. 000	1 dokume n	71.000.0 00	1 dokume n	75.000. 000	4 dokume n	306.000. 000	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	DIY
		0.00.01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas opersional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	100%	100%	4.459. 636.71 0	100%	849.136 .000	100%	17.243.6 48.820	100%	103.454 .829.40 2	100%	74.680.0 50.000	100%	54.562. 250.00 0	100%	250.789. 914.222	Badan Pengelo la Keuang an dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya																	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	636.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	230.000.000	-	0	4 Unit	1.650.000.000	4 Unit	1.930.000.000	-	0	-	0	7 Unit	2.580.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	52.885.000	-	0	44 Paket	6.511.750.000	20 Paket	5.337.500.000	20 Paket	6.396.300.000	21 Paket	9.298.000.000	105 Paket	28.543.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	35	1.736.384.910	105 unit	598.601.800	143 unit	1.600.585.820	141 unit	1.648.169.402	143 unit	1.697.750.000	149 unit	5.722.750.000	681 Unit	11.267.857.022	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	207.280.000	4 Unit	200.000.000	5 Unit	5.830.313.000	5 Unit	93.612.160.000	4 Unit	65.600.000.000	4 Unit	38.500.000.000	10 Unit	203.742.473.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	1.596.796.800	29 Unit	50.534.200	105 Unit	1.651.000.000	85 Unit	927.000.000	88 Unit	986.000.000	90 Unit	1.041.500.000	397 Unit	4.656.034.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan	100%	100%	8.511.668.746	100%	9.264.902.836	100%	10.039.119.919	100%	10.601.359.277	100%	11.145.347.249	100%	12.092.957.430	100%	53.143.686.711	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Umum Kantor																	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	6	36.977.000	6 laporan	33.262.000	6 laporan	61.611.000	6 laporan	65.142.100	6 laporan	68.706.310	6 laporan	71.406.941	30 laporan	300.128.351	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	3.631.337.946	72 Laporan	3.892.161.436	72 Laporan	4.281.727.785	72 Laporan	4.437.754.290	72 Laporan	4.614.262.942	72 Laporan	5.212.287.430	360 laporan	22.438.193.883	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	445.055.000	6 laporan	508.369.400	6 laporan	580.956.000	6 laporan	595.851.600	6 laporan	628.561.760	6 laporan	650.149.186	30 laporan	2.963.887.946	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	4.398.298.800	12 laporan	4.831.110.000	12 laporan	5.114.825.134	12 laporan	5.502.611.287	12 laporan	5.833.816.237	12 laporan	6.159.113.873	60 laporan	27.441.476.531	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	4.244.818.289	100%	3.622.490.600	100%	4.319.306.900	100%	4.506.296.408	100%	4.702.267.941	100%	4.884.759.950	100%	22.035.121.799	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	9.590.000	1 unit	2.500.000	1 unit	12.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	50.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	5 unit	628.071.000	186 unit	545.443.000	67 unit	800.770.100	74 unit	846.877.110	79 unit	894.344.821	85 unit	938.209.303	491 unit	4.025.644.334	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	809.022.289	56 Unit	972.880.700	58 Unit	1.005.758.400	62 Unit	1.053.876.410	62 Unit	1.106.656.801	62 Unit	1.147.823.022	62 Unit	5.286.995.333	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83	83	1.391.510.000	98 unit	1.338.134.400	117 unit	1.465.778.400	118 unit	1.511.542.888	113 unit	1.572.266.319	109 unit	1.616.727.625	109 unit	7.504.449.632	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	1.406.625.000	27 Unit	763.532.500	25 Unit	1.035.000.000	25 Unit	1.082.000.000	25 Unit	1.117.000.000	25 Unit	1.170.000.000	25 Unit	5.167.532.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	DIY
Total	1.500.550.634.235		1.525.469.051.786		1.541.886.919.088		691.687.894.519		685.565.164.181		690.761.527.042		5.135.370.556.616								

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027 bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemda DIY. Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD DIY 2022-2027 sebagaimana dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 berikut ini :

Tabel 23. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang Mengacu pada RPJMD 2022-2027

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)	Tahun 5 (2027)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
1.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	100	100	100	100	100	100	100	Sesuai RPJMD
2.	Optimalisasi Barang Milik Daerah	15.486.233.611	9.016.589.475	9.378.609.475	9.703.109.475	10.003.409.475	10.312.409.475	10.312.409.475	Sesuai RPJMD
3	Kategori RB Perangkat Daerah	A (82,73)	A (94,41)	A (94,89)	A (95,00)	A (95,20)	A (95,50)	A (95,50)	Sesuai RPJMD

Secara umum yang dimaksud dengan transparansi yaitu memberikan informasi terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi transparan menurut Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (1) yaitu yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara Adapun akuntabilitas dimaknai sebagai pengendalian sumberdaya pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 6 (5), akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat .

BAB VIII. PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah BPKA DIY merupakan produk perencanaan 5 (lima) tahunan yang bersifat dinamis dan mengacu kepada visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah BPKA DIY Tahun 2022 - 2027 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan penyusunan rencana kerja tahunan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Di dalam RENSTRA ini tercantum tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman kinerja BPKA DIY. Keberhasilan tujuan, sasaran dan capaian kinerja BPKA DIY sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak di seluruh tingkatan dalam unit kerja BPKA DIY guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan agar Perubahan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2022-2027 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi BPKA DIY .

KEPALA BPKA DIY



WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005

Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	V			
2	Penyiapan data dan informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	V			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	V			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	V			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	V			
7	Perumusan isu-isu strategis	V			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	V			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	V			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	V			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	V			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	V			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	V			

14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	V			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	V			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	V			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	V			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	V			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	V			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan	V			

Yogyakarta, Desember 2024

KEPALA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WISOS SANTOSO, SE, M.Acc
NIP. 19680215 199403 1 005



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telepon (0274) 562811 - Faks (0274) 564544
Website: bpka.jogjaprov.go.id
Email: bpka@jogjaprov.go.id
Kode Pos: 55213